

BAB III

GAMBARAN PERILAKU DATA

3.1. Perkembangan PDB Indonesia

Perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis ekonomi dinilai banyak pihak memiliki kinerja yang sangat baik, bahkan dipenghujung dekade 1980an, Indonesia digolongkan ke dalam kelompok negara berkembang terpilih yang diramalkan akan segera menjadi negara industri baru, mengikuti jejak negara-negara industri di Asia yang berorientasi ekspor (*outward-looking*).

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang suatu perekonomian untuk memproduksi aneka macam barang dan jasa bagi warganya untuk menyediakan tehnik produksi yang semakin baik dalam proses tersebut. Pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat diukur berdasarkan persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Walaupun pelaksanaan pembangunan nasional secara bertahap, akan tetapi tujuan setiap tahap pembangunan adalah sama, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Kesemuanya itu akan dicapai melalui kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor yang terangkum dalam Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, perhubungan, perdagangan, dan lain-lain, yang merupakan prasyarat tercapainya tujuan nasional tersebut.

Setelah melewati kelesuan ekonomi pada paruh pertama dekade 1960an, Indonesia mampu bangkit dan melewati masa-masa krisis nya. Pertumbuhan ekonomi yang mantap adalah salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan. Data statistik pertumbuhan ekonomi yang digunakan secara umum sebagai salah satu indikator dari proses pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan orde baru selalu positif bahkan pada tahun tertentu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka dua digit.

Selama Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pertama PDB riil meningkat rata-rata sebesar 8.56 persen pertahun, pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi ini ditunjang oleh program rehabilitasi dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Selama periode ini pemerintah mementingkan pengendalian inflasi, berusaha membangun kembali hubungan dengan komunitas negara donor dunia dan berusaha merehabilitasi infrastruktur fisik. Pada paruh kedua tahun 1973, harga minyak bumi dunia meningkat empat kali lipat, menghasilkan penambahan pendapatan bagi Indonesia, sehingga pada tahun ini pertumbuhan ekonomi riil Indonesia melonjak hingga menembus angka dua digit yaitu pada angka 11,3 persen.

Selama tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan Produk Domestik Bruto Indonesia memperlihatkan trend yang menaik. Tahun 1975 PDB riil naik sedikit dibanding tahun 1974 yaitu sebesar 7.630,8 Milliar Rupiah, pertumbuhan PDB riil 5,0 persen turun dibandingkan tahun 1974 yang sebesar 7,6 persen hal ini disebabkan oleh

penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar minus 3,6 persen, pada tahun 1976 pertumbuhan PDB riil Indonesia naik pada angka 6,9 persen dan pada tahun 1977 naik 2 angka hingga 8,9 persen pertumbuhan PDB riil Indonesia turun kembali hingga pada angka 6,3 persen pada tahun 1979 yaitu sebesar 10.164,9 Milliar Rupiah.

Pada tahun 1980 PDB riil Indonesia tercatat sebesar 11.169,2 Milliar Rupiah pertumbuhan PDB riil Indonesia naik drastis pada 9,9 persen hal ini disebabkan salah satunya oleh sumbangan dari peningkatan yang besar dalam harga minyak dunia, menyusul perang Iran-Iraq pada tahun 1979 dan naiknya sumbangan dari Industri pengolahan. Namun pada tahun 1982 PDB riil hanya sebesar 12.325,4 Milliar Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen terhadap tahun 1981. Hal demikian terutama dikarenakan jatuhnya harga minyak bumi dunia dan sekaligus menandai berakhirnya dekade pertumbuhan dan kelimpahan yang dibiayai minyak bumi. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tetap baik, sampai dengan tahun 1986 rata-rata pertumbuhan ekonomi tetap bertahan pada angka 4 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dikarenakan *term of trade* yang turut menurun.

Selama pelita IV berlangsung perubahan struktural yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Ketergantungan penerimaan devisa pada minyak bumi berkurang, dan ekspor non migas kian berperan besar. Bersamaan dengan itu peran sektor swasta dalam percaturan ekonomi nasional, kian besar. Selama Pelita IV inilah deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Selama Pelita IV

rata-rata laju pertumbuhan PDB atas harga berlaku dan PDB riil atas harga konstan 1983 adalah masing-masing sebesar 13 persen dan 5.22 persen. Rata-rata tingkat pertumbuhan 5.22 persen tersebut merupakan rata-rata tingkat pertumbuhan untuk tahun 1984, 1985, 1986, 1987 dan 1988, masing-masing sebesar 7,0 persen, 2,5 persen, 5,9 persen, 4,9 persen dan 5,7 persen. Produk Domestik Bruto riil pada tahun 1988 adalah sebesar 99.936,7 Milliar Rupiah naik sebesar 20,35 persen terhadap tahun 1984 yang sebesar 83.037,4 milliar rupiah.

Selama Pelita V pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,7 persen pertahun, melebihi target yang pernah dicanangkan yaitu rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Pada tahun 1990 PDB atas harga konstan 1983 sebesar 112.417,5 Milliar Rupiah dan pada tahun 1994 naik hingga 150.007,36 Milliar Rupiah.

Sampai dengan tahun 1997, sebelum terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan PDB Indonesia tetap menunjukkan trend yang positif. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1994 sampai dengan 1997 rata-rata sebesar 7,63 persen. Sedangkan PDB riil 1997 atas dasar tahun konstan 1993 Indonesia sebesar 458.139,35 Milliar Rupiah naik kurang lebih 100.000 Milliar Rupiah jika dibandingkan dengan tahun 1994 yang sebesar 357.046,63 Milliar Rupiah.

Selengkapnya data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan perubahannya baik menurut harga konstan maupun harga berlaku dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut ini:

Tabel 3.1.1
Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1969-1997

Tahun	PDB (Rp Miliar)		Perubahan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1969	2718.3	4820.5		
1970	3238.0	5182.0	19.1	7.5
1971	3672.0	5544.7	13.4	7.0
1972	4564.0	6067.2	24.3	9.4
1973	6753.4	6753.4	48.0	11.3
1974	10708.0	7269.0	58.6	7.6
1975	12642.5	7630.8	18.1	5.0
1976	15466.7	8156.3	22.3	6.9
1977	19033.0	8882.0	23.1	8.9
1978	22746.0	9566.5	19.5	7.7
1979	32025.4	10164.9	40.8	6.3
1980	45445.7	11169.2	41.9	9.9
1981	54027.0	12054.6	18.9	7.9
1982	59632.6	12325.4	10.4	2.2
1983	77622.8	12842.2 ^{a)}	30.2	4.2
		77622.8 ^{b)}		
1984	89885.1	83037.4	15.8	7.0
1985	96996.8	85081.9	7.9	2.5
1986	102682.6	90080.5	5.9	5.9
1987	124816.9	94517.8	21.6	4.9
1988	142020.3	99936.7	13.8	5.7
1989	162615.4	104486.4	14.5	4.6
1990	188529.5	112417.5	15.9	7.6
1991	227450.2	123225.2	20.6	9.6
1992	259884.5	131167.1	14.3	6.4
1993	302017.8	139707.3	16.2	6.5
		302017.8 ^{c)}		
1994	382219.7	354640.8	26.6	8.5
1995	454514.1	383792.3	18.9	9.4
1996	532568.0	414418.9	17.2	7.90
1997	627695.4	433245.9	17.9	4.70

Sumber : Statistik Indonesia dan Nota Keuangan dan RAPBN, berbagai edisi

^{a)} dan tahun-tahun sebelumnya atas dasar harga 1973

^{b)} dan tahun-tahun sesudahnya atas dasar harga 1983

^{c)} dan tahun-tahun sesudahnya atas dasar harga 1993

3.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) atau dalam APBN disebut sebagai belanja negara dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin merupakan jenis pembiayaan negara yang disediakan untuk mendukung pembiayaan berbagai transaksi yang bersifat lancar dan terus menerus, seperti kegiatan pembinaan, pemeliharaan, bimbingan, serta berbagai jenis kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembiayaan tersebut dialokasikan kepada seluruh departemen/lembaga non departemen, dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, baik pelaksanaan tugas administratif maupun pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai investasi yang produktif yang dilaksanakan Pemerintah, baik pembangunan sarana dan prasarana baru, maupun untuk rehabilitasi dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana produktif yang telah ada. Secara fungsional pengeluaran pembangunan dikelompokkan menjadi pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan bantuan proyek. Pembiayaan rupiah adalah pengeluaran pembangunan berasal dari tabungan pemerintah dan nilai rupiah bantuan program. Pembiayaan tersebut dikelompokkan menjadi pembiayaan bagi

departemen/lembaga, pembiayaan pembangunan daerah dan pengeluaran pembangunan lainnya.(Marwanto:1996,63)

Bila diteliti lebih lanjut ternyata pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup besar.Pengeluaran pembangunan riil naik sangat tajam pada tahun 1970-an, sebagai akibat langsung dari naiknya penerimaan dari minyak bumi dan mengalirnya bantuan luar negeri.Pemerintah dengan cepat mengalokasikan kenaikan proporsi anggarannya untuk pengeluaran pembangunan, sumbangan terakhir meningkat dari 20 persen pada tahun 1968 sampai menjadi 56 persen pada tahun 1976.

Selama Pelita I pengeluaran pemerintah berjumlah 3.238,1 miliar Rupiah, sekitar 62 persen diantaranya pengeluaran rutin.Jumlah pengeluaran selama Pelita II meningkat empat setengah kali lipat, menjadi 17.997,5 miliar rupiah.Proporsi pengeluaran pembangunan sedikit lebih besar daripada pengeluaran rutin, yakni: 50,78 persen berbanding 49,22 persen.Dalam Pelita berikutnya proporsi pengeluaran pembangunan juga lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin.Kenaikan jumlah total pengeluaran tidak lagi sebesar sebelumnya, hanya naik 26 persen.Selama Pelita IV dan V kembali proporsi pengeluaran rutin lebih besar dari pada pengeluaran pembangunan.Kenaikan jumlah total pengeluaran antara Pelita II dan Pelita IV hanya 87 persen, sedangkan antara Pelita IV dan Pelita V naik sebesar 111 persen.Dengan demikian secara analisis antara Pelita selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, terjadi perubahan pola pengeluaran pemerintah.Pengeluaran rutin lebih

besar dari pada pengeluaran pembangunan dalam Pelita I, IV dan V. Hanya dalam Pelita II dan III proporsi pengeluaran pembangunan lebih besar dari pada pengeluaran rutin. Selama Repelita I sistem penganggaran program mulai diterapkan pada anggaran pembangunan, dan sejak tahun 1973/1974 sistem ini diperinci lagi menjadi penganggaran sektor, program dan proyek.

Tabel 3.2.1
Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan
(Nilai dalam Miliar Rupiah, Proporsi dalam Persen)

Tahun Anggaran	Pengeluaran Rutin		Pengeluaran Pembangunan		Jumlah Pengeluaran
	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi	
1969/70	216.50	64.68	118.20	35.32	334.70
1970/71	288.20	62.94	169.70	37.06	457.90
1971/72	349.10	64.06	195.90	35.94	545.00
1972/73	438.10	59.50	298.20	40.50	736.30
1973/74	713.30	61.27	450.90	38.73	1164.20
Pelita I	2005.20	62.49	1232.90	37.51	3238.10
1974/75	1016.10	51.37	961.80	48.63	1977.90
1975/76	1332.60	48.81	1397.70	51.19	2730.30
1976/77	1629.80	44.24	2054.50	55.76	3684.30
1977/78	2148.90	49.91	2156.80	50.09	4305.70
1978/79	2743.70	51.77	2555.60	48.23	5299.30
Pelita II	8871.10	49.22	9126.40	50.78	17997.50
1979/80	4061.80	50.29	4014.20	49.71	8076.00
1980/81	5800.00	49.50	5916.10	50.50	11716.10
1981/82	6977.60	50.13	6940.10	49.87	13917.70
1982/83	6996.30	48.73	7359.60	51.27	14355.90
1983/84	8411.80	45.94	9899.20	54.06	18311.00
Pelita III	32247.50	48.92	34129.20	51.08	66376.70
1984/85	9429.00	48.65	9951.90	51.35	19380.90
1985/86	11951.50	52.36	10873.10	47.64	22824.60
1986/87	13559.30	61.94	8332.00	38.06	21891.30
1987/88	17481.50	64.85	9477.40	35.15	26958.90
1988/89	20739.00	62.87	12250.70	37.13	32989.70
Pelita IV	73160.30	58.13	50885.10	41.87	124045.40
1989/90	24331.10	63.75	13834.30	36.25	38165.40
1990/91	29997.70	60.66	19452.00	39.34	49449.70
1991/92	30277.60	58.14	21764.20	41.86	52041.80
1992/93	34031.20	58.51	24134.80	41.49	58166.00
1993/94	38799.30	60.21	25661.10	39.79	64460.40
Pelita V	157436.90	60.25	104846.40	39.75	262283.30
PJP I	273721.00	55.80	200220.00	44.20	473941.00
1994/95	44169.00	59.00	30691.70	41.00	74860.70
1995/96	50435.00	63.67	28780.70	36.33	79215.70
1996/97	61569.00	64.79	33454.30	35.21	95023.30
1997/98	62158.80	61.49	38927.90	38.51	101086.70

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN, Berbagai Edisi, diolah

3.2.1. Pengeluaran Rutin

Perkembangan pengeluaran rutin selama PJP I sampai dengan tahun keempat Repelita VI terus mengalami peningkatan. Dalam PJP I realisasi pengeluaran rutin meningkat rata-rata 24,4 persen pertahun yaitu dari 213,7 Miliar Rupiah dalam tahun pertama Repelita I menjadi 4.289,9 Miliar Rupiah pada tahun terakhir Repelita V. Sementara itu dalam tahun keempat Repelita VI dianggarkan pengeluaran rutin 62.158,8 Miliar Rupiah yang berarti 41 persen lebih tinggi dari realisasi pengeluaran rutin dalam tahun pertama Repelita VI. Sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun keempat Repelita VI, penyediaan anggaran belanja rutin meningkat rata-rata 22,5 persen pertahun.

Analisis kecenderungan mengenai komposisi anggaran rutin cukup terbuka secara relatif. Pada tahun-tahun awal Orde Baru, dimana gaji pegawai negeri mendominasi keadaan keadaan itu, besarnya hampir separuh dari keseluruhan. Pembayaran hutang diletakkan pada anggaran rutin dan sebagai persentase dari keseluruhan anggaran, pembayaran hutang sebelumnya turun sampai dengan permulaan tahun 1970-an.

Tidak terdapat perubahan penting dalam urutan empat bagian ini selama tahun 1970-an, dengan unsur gaji tetap menjadi hal yang terpenting diantara mereka. Meskipun demikian perubahan komposisi yang penting terjadi jelas sehingga pengetatan fiskal di tahun 1980-an. Berbagai kebutuhan yang menyangkut upaya pemberdayaan aparatur pemerintah termasuk kebutuhan perbaikan penghasilan pegawai telah berpengaruh

terhadap peningkatan realisasi belanja pegawai pusat tiap tahunnya. Apabila pada awal pelaksanaan Repelita I, realisasi gaji pegawai pusat baru 89,4 Miliar Rupiah dalam APBN 1997/1998 telah meningkat menjadi 21.192 Miliar Rupiah yang berarti meningkat rata-rata 21,6 persen pertahun.

Pembayaran hutang mulai meningkat tajam pada akhir tahun 1970-an, kelipatan empat secara nominal tahun 1977 sampai dengan tahun 1981, dan terjadi lagi tahun 1982 sampai dengan 1986. Karena total anggaran sedang naik secara lambat, kenaikan kenaikan ini diterjemahkan sebagai peningkatan yang dramatis, dari 10,6 persen ditahun 1977 menjadi 52,8 persen pada tahun 1988. Besarnya pembayaran hutang ini menyalip pembayaran gaji pada tahun 1986 dan terus membengkak. Selama PJP I pembayaran bunga dicicil hutang luar negeri terus mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi terhadap total pengeluaran rutin. Dalam periode ini pembayaran hutang meningkat rata-rata 35 persen pertahun yaitu dari 12,8 Milliar Rupiah pada awal PJP I menjadi 17.042,3 Miliar Rupiah diakhir PJP I. Sementara proporsi terhadap pembangunan rutin meningkat dari 6 persen menjadi 42,3 persen. Memasuki PJP II pembayaran hutang masih mengalami peningkatan. Pada awal PJP II proporsi pembayaran hutang terhadap pengeluaran rutin sebesar 41,5 persen dan pada tahun anggaran 1995/1996 menjadi 35,93 persen. Realisasi pembayaran hutang pada Repelita VI mencapai 18.298,4 Miliar Rupiah yang berarti meningkat menjadi 7,4 persen dari tahun anggaran 1993/1994. Dalam tahun anggaran

1997/1998 alokasinya dianggarkan 19.236,7 Miliar Rupiah atau 30,9 persen dari total pengeluaran rutin.

Dengan semakin pentingnya penerimaan minyak selama Repelita I dan Repelita II, maka persentase pengeluaran rutin yang dibiayai dengan PDBM menurun. Pokok permasalahannya adalah bahwa prospek jangka panjang industri minyak Indonesia tidak jelas, dan bahkan dalam jangka pendek pun penerimaan minyak dapat berubah secara tak terduga, seperti apa yang dialami sejak tahun 1972. Oleh sebab itu sebetulnya tidak ada suatu tingkat perbandingan antara PDBM dan pengeluaran rutin, justru kemungkinan lebih baik untuk mempertahankan peranan PDBM dalam anggaran belanja negara agar tidak semakin mengeci, dan akan lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang semakin luas, diperlukan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan yang semakin besar. Awal Repelita VI realisasi belanja barang baru mencapai 1.165 Miliar Rupiah dan dalam tahun keempat Repelita VI alokasi jenis pengeluaran ini direncanakan mencapai 8.895,2 Miliar Rupiah atau meningkat 16,9 persen pertahun.

3.2.2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan dalam APBN menggambarkan usaha-usaha negara untuk merealisasikan sasaran-sasaran pembangunan sektor pemerintah. Anggaran pembangunan sektor pemerintah memperoleh alokasi

pembiayaan yang berasal dari dana dalam negeri berupa tabungan pemerintah dan dana yang berasal dari luar negeri. Dalam tahun pertama Repelita I 71,6 persen pembiayaan pembangunan berasal dari bantuan luar negeri. Sementara yang berasal dalam negeri baru sekitar 28,43 persen. Tahun keempat Repelita VI 66,5 persen sumber pembiayaan berasal dari tabungan pemerintah sedangkan 37,5 persen berasal dari luar negeri.

Anggaran pembangunan telah memperlihatkan lebih banyak fluktuasi. Anggaran tersebut meningkat secara cepat selama periode boom minyak, lima belas kali lipat secara nominal selama tahun 1973 sampai dengan 1981. Tetapi kemudian mengalami penurunan tajam pada pertengahan tahun 1980-an. Anggaran pembangunan di departemen-departemen dipotong amat tajam pada tahun 1987, anggaran tersebut kurang dari sepertiga total keseluruhan tahun 1985 secara nominal. Bagian yang lain terutama subsidi dan investasi pada BUMN pada saat itu juga dipotong, meskipun tidak sama tajamnya. Demikian juga pengeluaran daerah dipangkas, tetapi seperti halnya anggaran rutin, bagian ini dikecualikan dari proses penghematan pada tingkat tertentu.

Pada awal Repelita I pada tahun 1969 penekanan pada pembangunan prasarana dasar dan sektoral. Ketiga sektor yaitu pertanian, industri/pertambangan, dan komunikasi mendominasi anggaran, menyerap lebih dari 70 persen dari total anggaran. Pada permulaan Repelita II terbukti terjadi perubahan prioritas. Pertanian jelas sekali merupakan sektor yang paling penting, menerima lebih dari 30 persen dari anggaran total. Hal ini

terjadi beberapa saat setelah terjadi krisis beras pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1973 dan merupakan periode disaat dasar-dasar pertumbuhan ekonomi yang cepat diletakkan. Pengeluaran pembangunan daerah dan Investasi BUMN juga mulai secara jelas terlihat bersama dengan tiga sektor utama sebelumnya pada Repelita I sektor pembangunan daerah dan sektor BUMN menerima 84 persen dari alokasi dana pada tahun itu.

Perubahan penekanan selanjutnya terjadi jelas ditahun 1979 enam tahun menuju boom minyak. Lima sektor diatas mempertahankan posisinya, tetapi prioritas-prioritas yang baru muncul. Yang paling utama pada sektor-sektor itu adalah pertahanan dan keamanan, pendidikan tenaga kerja dan transmigrasi penduduk. Pendidikan menerima prioritas yang lebih tinggi pada semua tingkat terutama gerakan untuk wajib belajar enam tahun (yang sekarang sembilan tahun). Program transmigrasi yang ambisius juga sedang dilaksanakan pada periode ini. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1984 sektor pertanian dan komunikasi terus bertahan diatas, sementara pendidikan bergeser menjadi urutan ketiga. Pada awal tahun 1990an prioritas utama sangat jelas pada prasarana fisik dan sosial. Komunikasi adalah sektor yang terbesar yang menyalip sektor pertanian. Minyak dan energi, daerah dan pendidikan seluruhnya menerima prioritas yang tinggi

Dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI, alokasi anggaran pembangunan bagi sektor prioritas secara keseluruhan mencapai 67 persen dari jumlah anggaran belanja pembangunan. Alokasi anggaran pembangunan tersebut masing-masing terdiri dari sektor pembangunan

daerah dan transmigrasi (19,4 %), transportasi (18,23%), pertambangan dan energi (12,0%), pendidikan(10,9%), serta pengairan(6,5%).

Sejak tahun pertama Repelita I sampai dengan tahun keempat Repelita VI, alokasi pembiayaan pembangunan bagi daerah mengalami peningkatan rata-rata 30,7 persen per tahun. Alokasi anggaran bagi pengeluaran belanja pembangunan lainnya selama PJP I mengalami kenaikan 23,7 persen per tahun. Dalam Repelita VI sampai dengan tahun ketiga, realisasi pengeluaran pembangunan lainnya mencapai 5.675,9 Miliar Rupiah atau menurun rata-rata 9,4 persen pertahun. Sementara tahun anggaran 1997/1998 dianggarkan 1.077,2 Miliar Rupiah atau 41,3 persen lebih rendah dari realisasi tahun anggaran 1996/1997.

